**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

# 2.1 Pengertian Administrasi

Organisasi dimanapun dan apapun bentuknya baik itu instansi pemerintah ataupun swasta, besar maupun kecil, tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut dibuat sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai faktor dan melalui proses yang memerlukan waktu dan pemikiran yang matang, sehingga didapat tujuan yang akan dicapai tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu penerapan kegiatan administrasi yang benar-benar efektif, sehingga dapat merumuskan dan mencapai apa yang diinginkan.

Administrasi, administrasi negara dan manajemen merupakan aitem yang tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu untaian sistem yang saling berkaitan dan memiliki keterhubungan yang sangat erat. Administrasi merupakan suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan. Hal tersebut sabagaimana dikemukakan oleh ***Sondang P. Siagian* (1997:3)** dalam bukunya ***“Filsafat Administrasi”*** bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah: **“Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.**

Definisi tersebut diatas, terlihat bahwa administrasi merupakan suatu proses kerjasama dimana dalam kerjasama terdapat adanya rangkaian kegiatan yang melibatkan sekelompok manusia dengan tujuan yang sama, serta terdapat adanya kesadaran bahwa dalam mencapai tujuan organisasi diperlukan usaha bersama-sama. Rangkaian kerja tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga merupakan suatu proses yang dilakukan secara teratur oleh sekelompok manusia yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi yang dikehendaki. Pada saat terjadinya kerjasama diantara manusia tersebut, maka pada saat itupun timbul adanya administrasi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh *Herbert A. Simon*yang dikutip oleh ***Sondang P. Siagian* (1997:5),** Mengatakan sebagai berikut: “**Apabila ada dua orang yang bekerja bersama-sama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat digulingkan hanya oleh seorang diantara mereka, pada saat ini administrasi telah ada”.**

Pengertian Administrasi Negara, menurut ***Sondang P. Siagian* (1997:8)** dalam bukunya ***“Filsafat Administrasi”*** yaitu: **“keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”.**

Jadi pada dasarnya didalam administrasi terdapat proses, dilakukan sekelompok orang, adanya kegiatan, adanya kemampuan kerjasama, adanya pembagian tugas dan adanya kesamaan tujuan. Sedangkan dalam administrasi negara tentunya kita mengenal istilah kepegawaian, karena kepegawaian ini merupakan bagian dari proses penyelenggaraan administrasi negara. Jelaslah bahwa administrasi mempunyai wadah sebagai fungsi, terdiri dari kegiatan dan tindakan-tindakan untuk melaksanakan kehendak negara. dan menempatkan faktor manusia untuk berperan aktif didalam administrasi negara. Faktor manusia disini dalam artian yaitu pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang berperilaku dan bertindak sesuai dengan peraturan yang ada, dengan memiliki perilaku yang terarah tentu akan berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan organisasi tersebut karena didalam suatu perilaku terdapat suatu sikap dan tindakan yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi tersebut.

* 1. **Pengertian Organisasi**

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang yang dipakai untuk melihat organisasi. Organisasi dapat dipandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur sistem kerja sama, orang yang berkerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

**Sondang P. Siagian** yang dikutip oleh **Saefuddin (1993:3)** dalam bukunya **“Organisasi dan Management”** mendefinisikan bahwa:

**Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan, dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang lain yang disebut bawahan.**

**Gibson, Donelly dan Ivancevich** yang dikutip oleh **Saefuddin (1993:3)**  dalam bukunya **“Organisasi dan Management”** berpendapat bahwa ciri khas organisasi tetap sama, yaitu perilaku terarah pada tujuan. Mereka berpendapat: **“Organisasi itu mengejar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai secara lebih effesien dan lebih effektif dengan tindakan yang dilakukan secara bersama”.**

**Koontz dan Cryill O’ Donnell** yang dikutip oleh **Siagian (1997:24)** dalam bukunya **“Management Suatu Pengantar”,** mengatakan:

**Organisasi adalah suatu hubungan wewenang dengan maksud untuk mengurus kedua koordinasi strukturil baik vertical maupun horizontal atara keadaan, kearah mana tugas-tugas khusus yang diinginkan itu diperuntukan untuk mencapai tujuan usaha.**

Definisi-definisi diatas menurut **Siagian (1997:24)** dalam bukunya **“Managemen Suatu Pengantar”** unsur Organisasi adalah:

* 1. **Adanya suatu tujuan bersama**
	2. **Tujuan itu dicapai atau diperoleh melalui atau bersamaan dengan bantuan orang lain dalam kerja sama yang harmonis**
	3. **Kerjasama itu didasarkan atas hal kewajiban dan tanggung jawab tertentu.**

Organisasi pada dasarnya merupakan suatu wadah kerjasama yang didalamnya terdapat serangkaian-serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah disetujui bersama. Didalamnya terdapat pembagian tugas dan wewenang, tanggung jawab serta hirarki yaitu seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan

**2.3 Pengertian Peranan**

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, perlu mengemukakan teori-teori sebgai kerangka berfikir untuk menggambarkan dari sudut pandang mana peneliti menyoroti masalah yang di pilih. Dalam beberapa literatur, di sebutkan bahwa peran memiliki berbagai definisi. Peran ini membarikan kerangka konseptual dalam studi prilaku di dalam organisai. Selain itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Dalam teorinya **Biddle dan Thomas**, yang dikutip oleh **Sarwono** dalam bukunya **Teori-Teori Pisikologi (2004:21)** mengatakan bahwa: **“Peran serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-prilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu”.**

**Biddle dan Thomas** seperti dikutip **Sarwono** membagi peristilahan teori dalam empat golongan, yaitu:

1. **Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.**
2. **Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.**
3. **Kedudukan orang-orang yang berperilaku.**
4. **Kaitan antara orang dan prilaku.**

Peran adalah seperangkat tindakan atau perbuatan atau pekerjaan yang di lakukan oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat dalam suatu pristiwa atau keadaan yang sedang terjadi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berikut ini hal-hal yang terkait denga peran:

1. **Subjek dan Target**

Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi soial dapat di bagi dalam 2 (dua) golongan sebagai berikut:

1. Subjek (prilaku), yaitu orang yang sedang berprilaku menuruti suatu peran tertentu.
2. Target sasaran yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan actor dan prilakunya.

Aktor maupun target dapat berupa individu maupun kelompok yang saling berhubungan. Secord dan Backman menyatakan bahwa aktor menempati posisi pusat *(focal position)* sedangkan target menempati posisi sederhana dari posisi pusat tersebut *(counter position)* dengan demikian aktor target merupakan patner dalam melakukan suatu peran.

1. **Perilaku**

Menurut Biddle dan Thomas seperti dikutip oleh Sarwono ada lima istilah tentang prilaku dalam kaitanya dengan peran:

1. **Expection (harapan) adalah harapan-harapan orang pada umumnya tentang prilaku-prilaku yang pantas ditunjukan olrh seorang yang mempunyai peran tertentu.**
2. **Norm (norma) adalah salah satu bentuk haraoan yang menyertai suatu peran dana merupakan suatu tuntunan peran (role deman). Tuntunan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.**
3. **Performance (wujud prilaku) adalah perwujudan prilaku secara nyata dalam suatu oeran oleh aktor kepada target sasaran.**
4. **Evaluaion (penilaian) dan saction (sanksi) adalah segala sesuatu yang didasarkan pada harapan masyarakat tentang norma. Berdasarkan norma tersebut orang memberikan penilaian berupa kesan positif atau negatif terhadap suatu prilaku. Sedangkan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan nilai positif agar perwujudan perilaku dalam peran di ubah sedimikan rupa sesuai dengan harapan dan norma dimasyarakat.**

Dengan demikian expection (harapan), norm (Norma), performance ( wujud prilaku), evalution (penilaian) dan sanction (sanksi) saling berkaitan dalam prilaku peran. Harapan dan norma merupakan segala sesuatu yang nerisi harapan atau keinginan masyarakat tentang perilaku yang menyertai suatu peran. Kemudian munculah wujud prilaku sebagai realisasi dari harapan dan norma tersebut sehingga timbulah penilaian dan sanksi terhadap prilaku yang telah diwujudkan tersebut.

1. **Kedudukan orang yang berprilaku**

Second & Backman dan Biddle & Thomas memberikan definisinya yang saling melengkapi tentang kedudukan (potensi) dari ke-dua definisi mereka dapat disimpulkan tentng kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama di ikuti perbedaanya dari kelompok-kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersam, perilaku yang sama-sama mereka perbuat dan reaksi orang lain terhadap mereka bersama.

Dengan demikian ada 3 (tiga) faktor yang mendasari penempatan seseorang dalam posisi tertentu.pertama, sifat-sifat yang di miliki bersama seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia, atau ketiga sifat itu sekaligus semakin banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, maka semakin sedikit orang yang dapat di tempatkan dalam kedudukan itu. Ke dua adalah peilaku yang seperti penjahat, olahragawan, pemimpin dan sebagainya. Ke tiga adalah reaksi orang lain terhadap mereka.

1. **Kaitan antara Orang dan Prilaku**

Biddle dan Thomas mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dapat dikaitkan ada atau tidak adanya dapat diperkirakan kekuatanya adalah kaitan antara orang dan prilaku dan prilaku dengan perilaku. Kaitan antara orang dengan orang dalam teori peran ini tidak banyak dibicarakan kriteria untuk menciptakan kaitan-kaitan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Drajat kesamaan atau ketidak samaan antara bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut. Drajat keamanan mempunyai kriteria yang di sebut konsensus yang berarti kaitan-kaitan antara perilaku-prilaku yang berupa kesepakatan mengenai suatu hal tertentu. Contoh: semua orang setuju bahwa ayah harus mengayomi anak-anaknya sedangkan drajat ketidaksamaan di sebut disensus. Ada 2 (dua) dinsensus menurut Biddle dan Thomas. Pertama, disensus yang tidak terpolarisasi, yaitu ada beberapa pendapat yang berbeda-beda. Contoh: ada beberapa murid berpendapat bahwa wali kelas mereka terlau di disiplin dan ada yang menilai wali kelas tersebut kurang sabar, dan sebagianya kedua, disensus yang terpolarisasi, yaitu ada dua pendapat yang saling bertentangan. Contoh: sebaian murid dikelas itu menilai wali kelasnya negatif karena terlalu ketat sedangkan sebagian murid yang lain menilai wali kelasnya positif karena di siplin.
2. Derajat saling menentukan atau saling ketergantungan antara bagian-bagian tersebut. Di sini suatu hubungan orang prilaku akan memengaruhi, menyebabkan atau menghambat hubungan orang-prilaku yang lain.contoh: ayah akan memengaruhi prilaku anak.
3. Gabungan antara derajat kesamaan dan saling dan saling ketergantungan. Hal ini terdiri atas konformitas, penyesuaian dan kecermatan. Konformitas *(conformity)* adalah kesesuaian ntara prilaku seseorang dengan prilaku orang-orang lain, atau perilaku seseorang dengan harapan orang lain tentang prilakunya. Sedangkan penyesuaian *(adjustment)* adalah perbedaan perilaku seseorang dengan yang di harapkan orang lain, sehingga butuh penyesuaiaan perilakunya sesuai dengan harapan orang lain. Kemudian kecermatan *(accuracy)* yaitu ketepataan penggambaran suatu peran. Deskripsi peran yang cermat adalah deskripsi yang sesuai dengan harapan-harapan peran itu, dan sesuai dengan perilaku nyata yang di tunjukan oleh pemegang peran itu.

Ditinjau dari prilaku organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, sistem norma dan budaya organisasi sehingga strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan presepsi peran atau *role perception*. **Soekanto** dalam bukunya sosiologi **Suatu Pengantar** **(2004:239-240),** menjelaskan bahwa:

**Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (ststus). Peranan adalah suatu aspek interaksi sosial dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dalam badan hukum menjadi aktivitas perilaku atau melaksanakan usaha-usaha yang sesuai dengan kedudukanaya.**

Seseorang atau sekelompok orang atau organisasi telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya, makan organisasi tersebut telah menjalankan peranan yang di bebankan kepadanya. Peranan dan kedudukan (status) adalah dua hal yang tidak bisa di pisahkan satu sama lain, dengan kata lain tidak ada kedudukan tanpa peranan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan. Kedudukan (status) itu sendiri dapat diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial, dimana ia ikut serta dalam berbagai pola kehidupan jika di pisahkan dari individu yang memilikinya maka kedudukan hanyalah kumpulan hak-hak dan kewajiban.

**Hartono dan Hunt** dalam bukunya **Sosiologi (1996:118)** mengungkapkan **peran adalah perilaku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai status**. Lebih lanjut lagi dikatakan:

**Peran (role) merupakan perilaku yang di harapkan dari individu atau kelomok yang mempunyai suatu status. Seseorang atau sekelompok masyarakat memiliki status dan diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu peran dan setatus adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban dan hak-hak tersebut.**

Kedudukan (status) dan peranan (role) merupakan unsur-unsur dalam lapisan masyarakat yang memili arti penting dalam sistem sosial. Sistem sosial adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakat dan tingkah laku individu tersebut. Soekantono dalam buku **Sosiologi Suatu Pengantar (2004:243),** peranan adalah: **“Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya sesuai dengan kedudukanya maka dia menjalankan suatu peranan”**.

Seseorang memiliki kedudukan (status) dan melaksanakan perananya sesuai hak dan kewajiban maka telah diberikan atas kedudukanya atau statusnya didalam suatu organisasi sehingga peran yang dimainkan seseprang dalam organisai, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan komponen orang itu untuk bekerja. Menurut **Levinson** yang dikutip dari Soekanto dalam buku **Sosiologi Suatu Pengantar (2004:244**), peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. **Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian perturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.**
2. **Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisai.**
3. **Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.**

**J. Levi** yang di kutip oleh **Sukantono** dalam buku **Sosiologi Suatu Pengatar (2004:246),** mengungkapkan bahwa:

1. **Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsunganya.**
2. **Peranan tersebut dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakanya.**
3. **Dalam masyarakam kadang kala dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.**
4. **Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat bahwa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.**

Dari uraian di atas bahwa peranan(role) merupakan suatu sekumpulan harapan atau prilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial,atau konsep tentang apa ysng dilakukan atau prilaku individu dalam organisasi sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya.peranan terbentuk atas norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

**2.4 Pemerintah**

Berbicara tentah pemerintah berarti menyangkut tugas dan wewenang. Selain dalam pemerintah seringkali harus menyinggung negara dan sistem politik. Sebab, baik dalam studi negara maupun kajian sistem politik, pemerintah merupakan elemen wajib dan bagian dari struktur politik masyarakat/rakyat. Dalam hal ini pemerintah dalam arti sempit di tegaskan kembali oleh **Affandi** dalam bukunya **Ilmu-ilmu kenegaran suatu studi perbandingan (1982:201)**, yaitu: **“Suatu organisasi teknis yang di lengkapi dengan kewenangan-kewenangan tertentu yang diperlukan untuk pengaturan dan pelaksanaan segala urusan tersebut”.**

**Affndi** dalam bukunya **Ilmu-ilmu kenegaraan suatu studi perbandingan (1982:203)** Pemerintah dalam arti luas menurut adalah:

**Mencakup semua badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Jadi, merupakan keseluruhan dalam organisasi di dalam Negara yang menjalankan kekuasaan Negara, merupakan gabungan dari organ-organ dan mekanisme legislatif, yudisial dan administrasi yang melaksanakan segala fungsi dan tugas negara.**

**Affandi** dalam bukunya **Ilmu-ilmu Kenegaraan Suatu Studi Perbandingan (1982:203)**, membedakan pengertian pemerintah dan pemerintahan sebagai berikut:

**Pemerintah di artikan sebagai lembaganya atau badanya, yaitu organ negara yang melakukan pemerintahan, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai pelaksanaan tugasnya, fungsinya atau aktivitasnya yang dilakukan oleh pemerintah.**

Berdasarkan pada pengertian pemerintah, maka pemerintahpun memiliki pengertian yang luas dan sempit. Pemerintah dalam arti sempit adalah pelaksanaan fungsi eksekutif, yaitu peelaksanaan dari pengaturan perundan–undangan Negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas berarti pelaksanaan dari fungsi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut **Wilson** yang di kutip **Kencana** dalam buku Pengantar **Ilmu Pemerintahan (2001:23)**, berpendapat bahwa:

**Pemerintah adalah pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisai kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang di persiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama, dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum masyarakat**

**Apter**  yang di kutip oleh **Kencana** dalam buku **Pengantar Ilmu Pemerintahan (2001:23)** menyatakan bahwa:

**Pemerintah adalah merupakan satuan angota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah monopoli praktisi mengenai kekuasaan paksaan.**

**W.S Sayre** yang di kutip **Situmorang** dalam buku **Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara (1999:20)**, pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah:

**Sebagai organisas dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaanya. Secara etimologis, yaitu bahwa istilah pemerintah asal kata dari perintah berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan:**

1. **Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara/badan tertinggi yang memerintah sesuatu negara seperti cabinet merupakan suatu pemerintah.pemerintah yakini kata nama subyek yang berdiri sendiri.**
2. **Pemerintah dilihat dari sgi tata bahasa merupakan kata jadian yang oleh karena subyek mendapatkan akhiran-an artinya pemerintah sebagai subyek melakukan tugas/kegiatan itu di sebut dengan pemerintahan yakini perbuatan memerintah.**

Dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan pemerintah adalah lembaga/badan organisasi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur dan memerintah masyarakat dalam suatu negara. Lembaga/badan organisasi tersebut masing-masing memiliki tugas legislatif, eksekutif serta yudikatif. Pelaksanaan dari fungsi-fungsi tersebut dikatakan pemerintah, yaitu merupakan kegiatan atau cara dari perbuatan memerintah yang dalam hal ini dititik beratkan dalam konteks kenegaraan maupun pengaturan bagaimana suatu masyarakat itu di perintah.

**2.5 Peran Pemeritah**

Secara umum tingkat penerapan desentralisasi suatu negara mendasari cara pemerintah dalam mendefinisikan perannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya.  Negara harus terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat atau negara hanya melibatkan diri sebatas pada bidang-bidang diluar kemampuan masyarakat. segala urusan harus dikendalikan pemerintah pusat, atau sejauh mungkin dilaksanakan oleh pemerintah lokal, kecuali hal-hal fundamental yang menyangkut kepentingan umum masyarakat. Hal-hal tersebut merupakan persoalan-persoalan yang signifikan.

Untuk mencapai kepada sasaran tersebut, maka proses pemberdayaan masyarakat dapat di lakukan melalui tiga tahapan, yaitu inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan sebagai dari pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat. Partisipateori diartikan dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, untuk rakyat. Sedangkan emansipteori diartikan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah bersama rakyat. Dengan demikian peran pemerintah dalam mensejahtrakan dan memandirikan masyarakat sangat di perlukan.

Fungsi pemerintah yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demin terciptanya kemakmuran, tidak serta merta di bebankan oleh masyarakat. Perlu adanya peran pemeritah yang secara optimal dan mendalam untuk membangun masyarakat, menurut **Labolo** dalam buku **Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep dan Pengembanganya (2010:32)**, peran pemerintah antara lain:

1. **Pemerintah sebagai regulator**

**Peran pemeritah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.**

1. **Pemerintah sebagai dinamistator**

**Pera pemerintah sebagai dinamistator adalah menggerakan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.**

1. **Pemerintah sebagai fasilitator**

**Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kodisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan.**

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan bagian dari empat fungsi pemerintah, menurut **Labolo** dalam buku **Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep dan Pengembanganya (2010:32)**, membagi fungsi pemerintah menjadi empat bagian, yaitu:

1. **Pelayanan (pablic service)**
2. **Pembangunan (development)**
3. **Pemberdayaan (empowering)**
4. **Pengaturan (regulation)**

Fungsi-fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksanakan dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan keadilan, pelayanan membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.

Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahtraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus globalisasi yang cepat saat ini.

**2.6 Pengertian UMKM**

Pengertian UMKM Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badanusaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.